

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam bentuk kemitraan pengelolaan IPAL antara Pemerintah dan Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan Kota Surakarta terjalin kesepakatan bahwa FPKBL dengan mandiri dapat mengelola serta mengoperasikan IPAL.
2. Akan tetapi diharapkan pemerintah tidak lepas tangan dalam pelimpahan wewenang pengoperasian IPAL di kampung batik laweyan. Hal ini yang ditakutkan apabila sudah berjalan dengan baik pemerintah seakan tak mau ambil pusing dalam penanganan limbah batik di wilayah laweyan.
3. Bentuk Kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan FPKBL bisa dikatakan sebagai kerjasama Bangun-Serah-Kelola (Build Transfer Operate) hal ini bisa dilihat dengan kepercayaan pemerintah untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab penuh pengelolaan IPAL kepada FPKBL.
4. Mekanisme yang digunakan pemerintah dalam mewujudkan keinginan publik dalam penangan limbah industri batik agar tidak mencemari lingkungan daerah aliran sungai. Tentunya dari berbagai penilain FPKBL dinilai dapat dengan baik mengelola IPAL serta dapat mewujudkan salah satu angan-angan

pemerintah yang dimana dapat menjaga aliran sungai agar bebas dari limbah industri batik yang tentunya akan sangat berbahaya bagi masyarakat di wilayah laweyan

4.2 Saran

Meskipun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sudah dibangun di kawasan Kampoeng Batik Laweyan pada tahun 2008, upaya ini masih kurang optimal. Setidaknya di kawasan tersebut membutuhkan dua lokasi IPAL Hanya saja tidak mudah untuk membuat IPAL di lokasi Kampung Batik Laweyan. Hal itu dikarenakan masalah pendanaan dan lokasi lahan yang terbatas hal ini dikarenakan kondisi geografis kampung batik laweyan yang tidak rata, kampung laweyan tengah dan barat bisa menggunakan ipal sedangkan di wilayah timur masih belum terjangkau akses ipal.. Dua hal itulah yang membuat pembuatan IPAL yang masih sangat jauh untuk direalisasikan. Terlebih harga pembuatan IPAL komunal tidak lah murah,

Pembangunan IPAL di kawasan sentra industri batik ini butuh campur tangan dari pihak Pemerintah Kota Surakarta. Terutama dalam penyediaan anggaran. Pasalnya, untuk membangun IPAL di kawasan Laweyan tidaklah dengan anggaran kecil. Terlebih jika harus membebaskan lahan yang dibutuhkan untuk membangun saluran-saluran IPAL tersebut. Masalah anggaran menjadi kendala yang sangat berpengaruh, maka penyelesaian masalah ini harus diambil alih oleh pemerintah. Pemerintahlah yang membiayai pembangunan IPAL yang

ideal dan memenuhi standar baku mutu lingkungan di kawasan ini. Pengolahan limbah batik agar lebih ramah lingkungan harus menjadi perhatian bersama. Perlu perhatian dan kerjasama semua pihak, baik Kabupaten atau Kota yang berbatasan dengan Kota Surakarta, serta pemerintah pusat untuk mencari solusi bersama mengelola limbah batik lebih ramah lingkungan.

Sedangkan untuk semua stakeholders yang merasakan manfaat dari terjalannya kerjasama pemerintah dengan FPKBL baiknya turut serta menjaga lingkungan, tidak ada lagi kasus pencemaran limbah sungai sehingga dapat menimbulkan dampak buruk pada kesehatan masyarakat yang mendiami daerah aliran sungai sekitar. Perilaku hidup warga yang baik tentunya dapat meningkatkan indeks pertumbuhan yang baik pula, sehingga keadaan perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik serta pembangunan berwawasan lingkungan dapat terus digalakkan